



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
DENGAN**



KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA

Nomor: 159/KPA.W23-A9/HK.05/I/2025

Nomor: Up.04.06/13-53-07/1/2025

TENTANG

**JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **6 Januari 2025** bertempat di Pengadilan Agama Maumere Kabupaten Sikka, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere
Alamat : Jl. Diponegoro, Kecamatan Alok Barat,
Kabupaten Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Herman Adianto Oematan, S.SIT
Jabatan : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
Alamat : Jalan El Tari No. 5, Kelurahan Kota Uneng,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Sikka, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Undang-Undang

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
19. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS
20. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

21. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
22. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6437/B.AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Penegasan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS
23. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam **PERJANJIAN KERJASAMA JAMINAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian adalah seperangkat instrumen, kaidah dan upaya yang dilaksanakan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam rangka menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian.
2. Perempuan adalah seorang istri yang telah berakhir ikatan perkawinannya karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) dan/atau belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan yang

menjadi korban perceraian kedua orang tuanya berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Gaji adalah penghasilan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Nafkah *mut'ah* adalah pemberian berwujud kenang-kenangan dalam bentuk uang atau benda dari mantan suami kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian.
6. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* adalah pemberian nafkah, tempat tinggal dan pakaian yang layak dari mantan suami kepada mantan istri
7. Nafkah pemeliharaan anak adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kepada anak yang hak pemeliharaanya telah ditetapkan kepada salah satu orangtuanya atau keluarga atau pihak lain yang mengantikannya.
8. Mahar terutang adalah pembayaran wajib yang diberikan dan dinyatakan dari calon suami kepada calon istri dalam akad nikah yang ditangguhkannya pembayarannya dan wajib dilunasi ketika terjadi perceraian.
9. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan samapai berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.
10. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan akibat adanya talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri karena suatu alasan – alasan tertentu berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkup Kantor Pertanahanan Kabupaten Sikka.
12. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Maumere.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama terkait Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memberikan perlindungan hukum kepada Perempuan dan Anak sebelum, selama dan setelah terjadinya proses Perceraian secara optimal;
 - b. Meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
 - c. Melaksanakan mitigasi dampak negatif dan resiko Perceraian seperti penelantaran anak, penelantaran ekonomi, kemiskinan baru, terputusnya pendidikan Anak serta dampak lainnya sebelum, selama dan setelah terjadinya Perceraian;
 - d. Memastikan pemenuhan hak – hak Anak dan Perempuan setelah terjadinya Perceraian terpenuhi secara efektif dan optimal;
 - e. Memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan perkara Perceraian dan pemenuhan hak-hak Anak dan Perempuan secara efektif, efisien dan optimal

Pasal 3

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang urgensi pemenuhan dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak sebelum, selama dan setelah terjadinya Perceraian
2. Pelaksanaan amar putusan Perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pemotongan gaji atau penghasilan lain yang sah dari Aparatur Sipil Negara untuk diserahkan kepada Perempuan dan Anak sesuai amar putusan Perceraian tersebut;

3. Pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi atas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak sebelum, selama atau setelah terjadinya Perceraian

Pasal 5

HAK – HAK ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

(1) Setiap Anak berhak untuk:

- a. hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. diasuh, diangkat anak asuh atau anak angkat oleh orang lain dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

kerusuhan sosial, pelibatan dalam persitiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual dan perlakuan salah lainnya;

k. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

(2) Dalam hal Anak terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf k, Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan

d. memperoleh hak Anak lainnya;

(3) Pelaksanaan dan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, k dan ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**

(4) Besaran nafkah dan pembiayaan yang diberikan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c setelah terjadinya Perceraian dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 6

HAK – HAK PEREMPUAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

(1) Setiap Perempuan berhak:

a. memperoleh penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

b. memperoleh persamaan di depan hukum;

c. memperoleh perlakuan yang non diskriminasi dengan berbasis keadilan dan kesetaraan *gender*;

- d. memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
 - e. memperoleh perlindungan atas kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi;
 - f. memperoleh nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang dan harta bersama;
- (2) Besaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang dan harta bersama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf f dapat ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 7

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan termasuk perceraian, pembagian harta bersama, pengasuhan anak, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomis yariah dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan Jaminan Perlindungan Hak - Hak Anak dan Perempuan setelah terjadinya Perceraian;
2. Membangun pelayanan peradilan yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tercermin dalam putusan Perceraian yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian.
3. Mencantumkan dalam amar putusan tentang pemotongan langsung penghasilan bagi seorang Aparatur Sipil Negara terkait kewajiban dalam pemenuhan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak;
4. Memberikan salinan amar putusan perceraian atau perkara lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap atas Aparatur Sipil Negara kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal amar putusan tersebut mencantumkan amar terkait Jaminan Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak;
5. Melaksanakan pertukaran dan sinkronisasi informasi dan data terkait perkara Perceraian dan Jaminan Perlindungan Hak - Hak Perempuan

- dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK KEDUA**
6. Melaksanakan edukasi dan pemahaman tentang urgensi pemenuhan serta Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**
- PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemahaman tentang urgensi pemenuhan serta Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**
 2. Melaksanakan pertukaran dan sinkronisasi informasi dan data terkait perkara Perceraian dan Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK PERTAMA**
 3. Mentaati isi dan amar putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal putusan tersebut mengandung amar terkait Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak.
 4. Melaksanakan intervensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dalam hal putusan tersebut memuat kewajiban bagi seorang Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan pemenuhan atas Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian
 5. Melaksanakan pemotongan Gaji bagi seorang Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban memenuhi Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8

PEMOTONGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya memuat kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara untuk memenuhi Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian sebagaimana diatur namun tidak terbatas pada Pasal 5 ayat (1) huruf e, k dan/atau Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf f.
- (3) Setelah menerima salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dan supervisi kepada bendahara atau pengelola sistem pembayaran Gaji di lingkup satuan kerja tempat seorang Aparatur Sipil Negara bertugas untuk melaksanakan pemotongan Gaji dalam rangka memenuhi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan tersebut.
- (4) Bendahara Gaji melaksanakan pemotongan terhadap Gaji untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (4) tidak terlaksana karena Gaji seorang Aparatur Sipil Negara yang dikenai kewajiban pemotongan sebagaimana termuat dalam amar putusan tidak mencukupi, bendahara atau pengelola sistem pembayaran Gaji dapat melaksanakan pemotongan dari penghasilan lain yang sah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).
- (6) Perempuan dapat mengambil langsung atau dengan surat kuasa atau pengiriman melalui bank atau melalui sarana lainnya hasil pemotongan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) yang menjadi haknya
- (7) Dalam hal ketentuan ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, bendahara atau pengelola sistem pembayaran Gaji melaporkan kendala dan hambatan yang dihadapi kepada **PIHAK KEDUA**
- (8) Atas hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut, **PIHAK KEDUA** menyampaikan hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**
- (9) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam rangka terpenuhinya Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak setelah terjadinya Perceraian

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

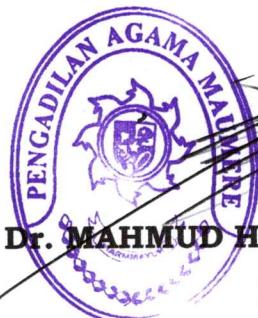
- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama atau Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Dr. MAHMUD HADI RYANTO, S.H.I.,
M.H.I.

PIHAK KEDUA



HERMAN ADIANTO OEMATAN, S.SIT